

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Landasan konseptual dan filosofis dari konflik, mengisyaratkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa konflik merupakan fakta kehidupan, maka tidak mungkin untuk dihindari dalam proses dinamika sosial masyarakat. Konflik dimaknai sebagai perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka yakni nilai, status, kekuasaan dan otoritas oleh dua pihak atau lebih yang pada dasarnya tidak sejalan secara tujuan dan asas perjuangan (Fisher, 2005).

Konflik tidak dapat dilepaskan dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejak zaman kolonial, telah terjadi konflik berupa sabotase hak rakyat atas sumber daya alam. Adapun pepatah Jawa yang menyatakan, *Sadhumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati*. Yang artinya, satu sentuhan dahi, sejarai bumi, bertaruh mati. Berani menyentuh sejengkal tanah saja bisa bertaruh nyawa. Hal ini yang mendasari bahwa rakyat merupakan pemilik sah atas sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Namun, hadirnya pengaruh kolonialisme dengan kepentingan ekonomi politiknya, menggeser secara paksa hak rakyat atas sumber daya alam.

Konstitusi Negara Indonesia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Namun amanat kemakmuran rakyat yang tertera dalam konstitusi, menjadi sebuah refleksi bagi keberjalanan bangsa ini, dimanifestasikan oleh adanya permasalahan konflik agraria yang masih menyelimuti bangsa ini, terutama apa yang terjadi di sektor daerah – daerah di Indonesia.

Secara kebijakan, asas rekognisi tetap diakui oleh pemerintah terhadap desa-desa adat di Indonesia. Di samping itu, desa juga diberikan kewenangan otonom untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri (Timotius, 2018). Suatu keterhubungan, dimana konflik agraria yang terjadi pada desa yang otonom, menjadi suatu permasalahan yang kompleks ketika kita berbicara mengenai dinamika konflik yang ada serta kewenangan pemerintah desa serta aktor – aktor yang terlibat. Secara historis, Pascakemerdekaan, kapitalisasi desa menjadi isu yang sangat krusial. Ini merupakan dalih langkah awal untuk melakukan pembaruan agraria di Indonesia. Tetapi proyek pembaruan gagal total ketika lahir Orde Baru dimana pada era ini secara hegemonik mencengkeram rakyat melalui modernisasi di pedesaan. Proyek revolusi hijau dilancarkan untuk memperdalam kapitalisasi pertanian di desa, program eksploitasi hutan dilakukan untuk menopang ekspor non migas, juga dilakukan eksploitasi bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi melalui industri tambang.

Proyek modernisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di perdesaan secara besar-besaran ini ditopang dengan model pembangunan bersifat *top down* yang direkayasa oleh teknokrat, birokrasi, militer, dan kontrol kuat birokrasi sipil. Semuanya itu didukung oleh modal asing maupun modal swasta dalam negeri. Pendukung pembaruan agraria dihabisi, sementara rakyat terkena depolitisasi sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Ini semua menggambarkan bahwa regulasi di bidang pengelolaan sumber daya alam yang telah dibuat oleh Orde Baru telah menyimpang dari nilai asli desa secara ekologis. Produk hukum yang dibuatnya untuk kepentingan kapital, dan tidak ramah untuk kepentingan rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa konflik agraria terjadi dalam beberapa sektor mulai dari sektor perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian, kehutanan, pesisir/kelautan dan pertambangan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau dan Lampung adalah lima provinsi utama tempat konflik agraria paling banyak sepanjang 2017.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam momentum pernyataan sikap Hari Tani Nasional 2017. Terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi. Kondisi demikian juga merusak ekosistem air melalui data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 118

Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kekeringan juga telah berdampak pada 56.334 hektar lahan pertanian dan mengakibatkan 18.516 hektar lahan di Indonesia mengalami gagal panen. Realita ini menunjukkan kebijakan reforma agraria oleh pemerintah tidak serius dilakukan. Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Beberapa paket ekonomi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, karena menyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak lain dari perluasan investasi. Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukkan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan.

Salah satu representasi nyata mengenai konflik agraria yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni apa yang terjadi Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman. Konflik ini bermula pada tahun 2017 dan dimulai oleh masyarakat di seberang dusun Jomboran, yakni warga Pundak Wetan, Nanggulan, Kulon Progo yang melawan PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani. Sejak saat itu, warga telah melaporkan kegiatan penambangan ilegal kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, imbas dari pelaporan tersebut justru sejumlah masyarakat yang menolak pertambangan di desa mereka telah dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan dipanggil oleh Polres Sleman untuk diinterogasi. Tuduhan ini berupa kekerasan terhadap barang dan orang, penghasutan, serta menghalang - halangi. Dilain sisi, kedua

perusahaan besar tersebut belum pernah dilakukan penyelidikan dikarenakan belum adanya pembuatan kesepakatan lisan ataupun tertulis dengan masyarakat untuk melakukan musyawarah mengenai izin penambangan. Dalam hal ini, masyarakat yang menolak akan penambangan berdalil bahwa upaya yang dilakukan semata - mata hanya untuk melindungi lingkungan tempat Desa Jomboran. Adapun relasi kuasa yang ada berupa transaksional diantara kepala Desa Jomboran dengan PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan (PT) Pramudya Afgani mengenai izin penambangan di Sungai Kaliprogo.

Dinamika Konflik Agraria di Desa Jomboran, tidak lepas dari pengaruh peresmian kebijakan Undang-undang Keistimewaan (UUK) pada tahun 2012 lalu, menjadi penguat program kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pertambangan serta melegitimasi Kesultanan dan Pakualaman sebagai badan hukum sehingga berhak menjadi subjek kepemilikan tanah yang sah secara hukum. Sejak disahkannya UUK, muncul berbagai konflik agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta antara masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah yang mengklaim tanah-tanah yang didiami warga sebagai *Sultan Ground*.

Dari kondisi realita dinamika konflik agraria di atas, penelitian ini mencoba melakukan Analisis mengenai dinamika konflik agraria dalam sudut pandang ekologi serta tata kelola pemerintahan desa dan kewenangan otonomi yang dimiliki, secara implementatif bertabrakan secara teori maupun konseptual. Melalui ini dengan studi kasus apa yang terjadi di Desa

Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman untuk dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dinamika konflik agraria mengenai kepemilikan dan status kebijakan Sultan Ground di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman?
- b. Faktor apakah yang menjadi penyebab konflik agraria mengenai kepemilikan dan status kebijakan Sultan Ground di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dinamika konflik agraria mengenai kepemilikan dan status kebijakan Sultan Ground di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab konflik agraria mengenai kepemilikan dan status kebijakan *Sultan Ground* di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan riset ilmu politik dan pemerintahan, khususnya

mengenai dampak konflik agraria melalui status *Sultan Ground* bagi keberlanjutan dampak penerapan status kebijakan agraria dengan dampak dinamika konflik agraria yang masih eksis di tengah kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Dengan melaksanakan penelitian skripsi terkait, peneliti dapat mengidentifikasi keselarasan antara implikasi penerapan status kebijakan *Sultan Ground* dengan dampak dinamika konflik agraria di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman. Di samping itu, peneliti bisa mengidentifikasi beragam permasalahan yang muncul seputar pemenuhan hak atas kepemilikan tanah dan kelestarian lingkungan melalui sudut pandang ekologi politik.

1.5 Kerangka Teori

a. Teori Konflik

Secara paradigmatik, konflik agraria dan studi kasus terkait, menjadi suatu akar yang relevan, ditinjau dari salah tiga penyebab konflik yaitu teori negosiasi prinsip, dimana teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi - posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak - pihak yang mengalami konflik. Selanjutnya juga selaras mengenai teori kebutuhan manusia, yang mana konflik berakar dalam yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental dan sosial yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi.

Lalu selaras dengan teori kesalahpahaman antarbudaya dimana dalam teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara - cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda (Fisher, 2000: 8 – 9).

Selaras dengan teori konflik yang secara konseptual berbicara mengenai dampak adanya struktur kelas di masyarakat. Konflik dimaknai sebagai cara memandang masyarakat sebagai arena ketimpangan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Adanya empat konsep dasar dalam teori konflik yaitu struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang dan adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial.

Latar belakang fenomena ini tidak lepas dari konflik antar kelas sosial yang berdampak menjadi suatu permasalahan sosial. Latar belakang pemikiran tersebut didasarkan pada terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun para pemilik modal terhadap kaum proletar. Konflik sosial yang terjadi menghasilkan dinamika sosial yang disatu sisi tidak hanya permasalahan sosial, namun melahirkan perubahan sosial. Dalam konteks ini, tentu saja kita tidak lepas dari lahirnya gerakan sosial yang muncul sebagai akibat dari dinamika sosial. Gerakan sosial merupakan wujud dari suatu pilihan aktivisme dalam konteks perubahan

ekonomi politik yang secara konsisten bergerak atas dasar keresahan bersama dan ideologis untuk menentang praktik neoliberalisme yang apabila dikontekstualisasikan dalam objek penelitian, praktik neoliberalisme yang terjadi oleh karena kegiatan pertambangan. Dalam kaitannya gerakan sosial baru, menekankan kebebasan dalam gerakan itu sendiri. Kebebasan yang dimaksud yaitu gerakan sosial yang tidak memiliki struktur organisasi yang birokratis namun berkepentingan atas isu perjuangan yang sama atas dinamika sosial yang terjadi (Marx, 1960).

Teori konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Secara konseptual, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa dari segi kepemilikan, kekuatan dan sumber daya (Dahrendorf, 1968).

Adapun pemikiran mengenai konflik yang berpandangan bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari pemikirannya tentang bentuk – bentuk superordinasi dan subordinasi (perihal dominasi dan ketaatan). Dalam banyak kasus konflik yang terjadi, variabel hubungan dominasi dan ketaatan sifatnya saling berinteraksi dan bertimbal balik. Perilaku

dominasi dan ketaatan apabila dikaitkan dengan teori konflik, menunjukkan bahwa kerjasama dan konflik di antara individu dan kelompok sosial tidak hanya dapat bereksistensi secara terpisah tetapi tentu berhubungan sangat erat. Dalam teori konflik, menekankan bahwa aksi sosial selalu melibatkan harmoni dan konflik, cinta dan kebencian yang menguatkan tujuan dari analisis teori konflik. Konflik secara alamiah ada dalam kehidupan sosial dan memperlihatkan bahwa individu – individu tidak hanya sekedar mau melibatkan diri dalam konflik, individu ini pun juga semangat dalam berkonflik baik isu yang dirasa berdampak besar ataupun berdampak kecil (Simmel, 1957).

Adapun Teori Konflik yang mengemukakan bahwa konflik bersifat positif apabila mampu dikelola sewajarnya. Mengenai tradisi sosiologi konflik, dimana konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor – faktor lain daripada perlawanan kelompok kepentingan. Diperlihatkannya konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Hal inilah merupakan fungsi positif konflik, bahwa konflik memiliki fungsi terhadap sistem sosial dan menolak bahwa hanya konsensus dan Kerjasama yang memiliki fungsi terhadap integrasi sosial. Adapun dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis memiliki sumber yang kongkrit dan bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika telah diperolehnya sumber perebutan itu dan bila diperoleh tanpa adanya pertentangan langsung, maka konflik berkecenderungan bersifat tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis.

Konflik non realistis merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertahankan identitas suatu kelompok dan cara ini mewujudkan bentuk – bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber lain. Sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe ini sekaligus, sehingga menghasilkan situasi konflik yang kompleks. Konflik yang disembunyikan atau secara permukaan tidak berlangsung suatu konflik, bukan berarti stabilitas kelompok terjamin. Suatu hubungan yang bebas dari konflik tidak dapat diindikasikan bahwa hubungan tersebut terbebas dari unsur – unsur yang menghancurkan(Coser,1956).

b. Ekologi Politik

Cara pandang dalam menganalisis konflik agraria sangat erat dengan paradigma dalam ekologi politik, yaitu paradigma ekosentrisme, biosentrisme dan antroposentrisme. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dipandang sebagai satu-satunya entitas yang memiliki nilai tertinggi. Entitas lain, seperti hewan, tumbuhan, dan organisme-organisme abiotik, ada untuk kepentingan manusia. Manusia menjadi penguasa dan pemilik dari alam secara luas. Jika manusia adalah tuan atas alam, maka manusia berhak mengeksploitasi alam sesuai keinginannya. Alam hanya menjadi sumber daya yang ada bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Hasilnya, alam rusak karena eksploitasi berlebih yang dilakukan oleh manusia. Teori biosentrisme dan ekosentrisme

mencoba untuk memberikan pandangan alternatif dalam melihat relasi manusia dan alam. Biosentrisme dan ekosentrisme adalah antithesis dari antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme memusatkan etika lingkungan (Keraf, 2002: 4-5).

Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam berpendapat bahwa perlu adanya suatu rekonstruksi ontologis untuk mengetahui dasar dari problem ekologis yang ada saat ini. Tesis yang diajukan adalah bahwa manusia telah memisahkan diri dari alam. Keterpisahan itu membuat ekuilibrium alam terganggu. Adapun kritik pada eksplanasi ini oleh para ahli, yang berpendapat bahwa penggunaan diksi “Manusia” secara abstrak membuat analisis yang abai mengenai perbedaan - perbedaan ontologi yang ada di dunia. Konsep “Alam” yang digaungkan tidak valid karena kondisi Ekuilibrium itu sendiri tidak pernah ada di Bumi. Selanjutnya, konsep Disekuilibrium mengasumsikan keterpisahan manusia dan alam. Selain itu, konsep Disekuilibrium juga tidak relevan dalam menghadapi permasalahan aktual saat ini, yakni Epos Antroposen. Epos menandai berubahnya kondisi Bumi secara fundamental. Maka, problemnya bukanlah bagaimana mengembalikan Ekuilibrium yang tidak pernah ada, melainkan menghadapi perubahan tersebut. Menurut biosentrisme, manusia memiliki kewajiban moral terhadap alam sebab setiap kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, apapun bentuknya. Biosentrisme hendak memperluas cakupan etika agar ia tidak hanya menjadi domain manusia, melainkan seluruh kehidupan di muka Bumi. Berbeda dengan biosentrisme, teori ekosentrisme memperluas

penekanan biosentrisme dari kehidupan menuju Bumi sebagai totalitas. Bumi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mati dan sumber eksploitasi manusia. Melainkan, Bumi adalah tempat berlangsungnya kehidupan setiap spesies makhluk hidup yang bergantung padanya. Ekosentrisme mengkritik dikotomi antara manusia dan alam serta dikotomi akal dan emosi. Dikotomi tersebut menyebabkan keterpisahan yang menyebabkan manusia mempunyai pembenaran untuk melihat bahwa dirinya adalah penguasa dari alam. Namun paradigma ekosentrisme, menyatakan bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan (Dewi, 2019: 12-38).

Secara konseptual melalui berbagai kebijakan yang mengatur sedemikian rupa perihal ekologis dan tanah, tidak dapat dipungkiri bahwa lahan – lahan yang secara tradisional dirawat dan diolah oleh warga, tergerus oleh ekspansi modal raksasa berbasis sumber daya alam yaitu pertambangan di wilayah pedesaan. Akumulasi primitif menerangkan bahwa operasi pertambangan raksasa yang mengambil alih tanah leluhur dan menghancurkan habitat alami, sambil menyingkirkan para pemilik tanah tradisional. Akumulasi primitif digunakan sebagai analisis yang bersifat konseptual dan deskriptif. Akumulasi primitif merupakan proses pembentukan kelas pekerja modern yang kuat, berkuasa dan berdaulat atas warga masyarakat adat yang kehilangan ataupun belum memahami alat – alat produksi untuk menggarap lahan. Secara historis, akumulasi primitif erat kaitannya dengan proses kelahiran kapitalisme. Studi kasus nyata akan

hal ini melalui penggambaran sejumlah pengalaman tentang penyingkiran paksa para petani dari lahan – lahan pertanian dan beralihnya mereka menjadi kelas pekerja seperti terjadi di Inggris di era revolusi industri (Marx, 1960).

Munculnya penafsiran yang berbeda mengenai akumulasi primitif melalui pengenalan konsep akumulasi melalui perampasan sebagai tafsir modern dari akumulasi primitif. Praktik – praktik kanibalistik terhadap sumber daya, terjadi di negeri kapitalis maju dengan semangat privatisasi, reformasi pasar dan neoliberalisasi. Sehingga disebutlah sebagai akumulasi melalui perampasan. Akumulasi melalui perampasan mencakup hal yang sangat luas, termasuk suatu dalil dimana penswastaan terhadap tanah milik rakyat menjadi suatu hal yang akan umumnya terjadi dalam keberjalanan suatu bangsa (Harvey, 2005).

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan selaras dengan metode penelitian kualitatif yakni rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Cresswell, 2016), dikarenakan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara luas dan mendalam mengenai hubungan sebab – akibat antar variabel dalam

konflik agraria di Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman.

b. Situs dan Subjek Penelitian

Dalam konteks situs dan subjek penelitian, untuk menentukan informan dalam penelitian ini digunakan teknik non probabilita (non probability sampling) dan secara spesifik yakni *sampling purposive*. Prosedur purposif adalah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 2011:107). Didefinisikan pemilihan informan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data.

Informan atau subjek dalam penelitian ini adalah data-data penelitian yang didapatkan dari informan-informan yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Desa Jomboran, Masyarakat Desa Jomboran, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam dinamika konflik, PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Jomboran, Kecamatan Sendangagung, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya dan mengandung unsur kebaruan melalui studi kasus (Yin, 2014:18). Dalam riset yang akan dilakukan, data primer diperoleh peneliti melalui pelaksanaan observasi, wawancara, dan diskusi terarah dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Desa Jomboran, Masyarakat Desa Jomboran, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam dinamika konflik, PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan PT. Pramudya Afgani.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui beragam sumber pendukung. Dalam riset yang akan dilakukan, data sekunder didapatkan dari buku literatur, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, media massa, peraturan pemerintah, undang-undang, dan laporan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan menggunakan metode studi kasus berdasarkan rumusan. Studi kasus merupakan penelitian empiris yang meneliti fenomena secara sentris, menekankan pada “bagaimana dan mengapa”. Metode studi kasus yakni mampu untuk menghubungkan dengan berbagai bentuk

data baik teknik wawancara, observasi, dokumen dan peralatan (Yin, 2014: 18).

Teknik wawancara berupaya memperoleh data berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan partisipan secara mendalam (*indepth*) melalui rincian pertanyaan. Peneliti pada awalnya menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih terperinci secara lebih mendalam (Raco, 2010:10).

2. Data Sekunder

Selaras dengan metode studi kasus yang berfokus pada penghubungan atau keterkaitan antar berbagai bentuk data baik teknik wawancara, observasi, dokumen dan peralatan (Yin, 2014: 18). Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui dokumentasi (arsip, gambar dan sejenisnya). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa material tertulis. Data yang diperoleh dapat berbentuk buku, jurnal, surat kabar, notula rapat, agenda dan laporan perencanaan atau evaluasi suatu kebijakan.

c. Teknik Analisis Data

1. Teknik Flow Chart Analysis

Analisis data merupakan tahap pengolahan, pengklasifikasian, dan penyederhanaan data ke dalam wujud yang lebih ringkas guna memperoleh pola, tema, ataupun konsep yang

serupa. Teknik *flow chart analysis* merupakan teknik analisis data yang dijalankan selama penelitian berlangsung dengan meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Samsu, 2017:105).

Reduksi data merupakan tahapan analisis paling mendasar yang berisikan aktivitas penyaringan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data berguna untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara ringkas, padat, dan terorganisir dengan menyisihkan temuan yang tidak signifikan.

Penyajian data adalah tahapan penyatuan hasil penelitian yang telah direduksi secara terpadu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran kesimpulan dan menentukan kegiatan selanjutnya. Teks narasi menjadi jenis tampilan data kualitatif yang lazim digunakan.

Verifikasi data merupakan tahapan paling akhir berupa pembuatan kesimpulan riset. Terdapat dua jenis kesimpulan yang dapat dihasilkan, yakni kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir.